

NASKAH PUBLIKASI

**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN KOMITMEN
ORGANISASI POLITIK, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Studi Empiris di DPRD Kabupaten Klaten)**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :
YOGA NUGROHO
B200110049

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul :
**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN KOMITMEN
ORGANISASI POLITIK, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris di
DPRD Kabupaten Klaten).**

Yang di tulis oleh :

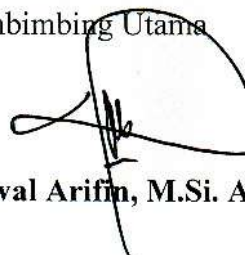
YOGA NUGROHO

NIM : B 200 110049

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut memenuhi syarat untuk di terima.

Surakarta, 17 Februari 2016

Pembimbing Utama




(Drs. Atwal Arifin, M.Si. Ak)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis




(Dr. Triyono, SE. M.Si)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) pada DPRD Kabupaten Klaten.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota dewan yang bekerja di DPRD Kabupaten Klaten. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 48 responden. Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik *sampling jenuh*. Alat analisis yang digunakan meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji linier berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi R^2 .

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H_1 diterima. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H_2 dan H_3 diterima. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H_4 dan H_5 ditolak. Transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, sehingga H_6 dan H_7 diterima.

Kata kunci : Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, Akuntabilitas, Transparansi Kebijakan Publik.

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of organizational commitment, accountability and transparency of public policy on the relationship between knowledge about the budget of the supervisory board of the council on local finance (budget) at the DPRD Klaten.

The population in this study were all members of the board who work in DPRD Klaten. The number of samples in this study were 48 respondents. Methods of sample collection using sampling techniques saturated. The analytical tool used include validity and reliability test, normality test, multicollinearity, heteroscedasticity test, multiple linear test, F test, t test, and test koefisien determination R^2 .

Based on the results of data analysis can be concluded that the knowledge of the board about the budget affect the supervisory board in the financial area, so that H_1 is accepted. Organizational commitment affect the relationship of knowledge about the budget council with the board on financial supervision area, so that the H_2 and H_3 accepted. Accountability does not affect the relationship of knowledge about the budget council with the board on financial supervision area, so H_4 and H_5 rejected. Transparency of public policy affect the relationship of knowledge about the budget council with the board on financial supervision area, so that H_6 and H_7 accepted.

Keywords: Knowledge Council On Budget, Financial Control Areas, Organizational Commitment, Accountability, Transparency in Public Policy.

PENDAHULUAN

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Dalam rangka mewujudkan *good governance* di lingkungan pemerintahan daerah, Pemerintah harus melakukan reformasi dalam segala aspek pengelolaan keuangan daerah.

Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 merupakan tonggak awal pelaksanaan otonomi daerah dan proses awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan daerah di Indonesia. Otonomi yang luas, nyata, bertanggungjawab membawa perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Pramita dan Andriyani (2010) yang berjudul “Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan daerah (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Se-Karesidenan Kedu)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

1. Konsep Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai uang publik. Anggaran ini digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kerja, sebagai alat untuk memotivasi pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Raharjo, 2000 dalam Novietta, 2010)

2. Pengertian Keuangan Daerah

Undang-Undang pasal 1 No. 17 Tahun 2003, tentang keuangan negara menjelaskan bahwa, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

tersebut. Pengertian keuangan daerah berdasarkan pada pengertian keuangan negara di atas, pada dasarnya sama, di mana “negara” dianalogikan dengan “daerah”, hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang.

3. Pengawasan Keuangan Daerah

Secara umum, pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah anggaran yang telah disusun dapat berjalan dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPRD) untuk turut mengawasi kinerja pemerintahan.

4. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD) deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran (Yudhono, 2001 dalam widyaningsih dan Pujirahayu, 2012). Secara teoritik, pelaksanaan fungsi-fungsi mengenai hak, tugas, dan wewenang DPRD secara efektif hanya mungkin dilakukan oleh para anggotanya yang mempunyai tingkat kualitas tinggi (Utami dan Syofyan, 2013).

5. Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Mardiasmo (2002:105) transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

6. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan pertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat (Juliastuti, 2013). Dewan dan masyarakat perlu memahami pentingnya

akuntabilitas publik supaya dapat mengawasi keuangan daerah secara maksimal. Pengawasan dewan yang diiringi dengan pengawasan dari masyarakat akan lebih efektif dan membuat masyarakat lebih percaya pada kinerja pemerintah daerah.

7. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi (Pramita dan Andriyani, 2010). Komitmen organisasi adalah tingkat keterikatan individu kepada organisasi tertentu yang dicerminkan dengan karakteristik adanya keyakinan untuk mengusahakan yang terbaik untuk organisasi, dan adanya keinginan yang pasti untuk mempertahankan keikutsertaan dalam organisasi (Mabley et al, 1979 dalam Novietta, 2010).

Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis pernah dilakukan (Pramita dan Andriani, 2010) dengan judul “Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah” (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu), hasil penelitian tersebut yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah, sedangkan komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian survey merupakan penelitian lapangan yang dilakukan terhadap beberapa sampel dari suatu populasi tertentu yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner (Masri S, 2007).

Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Kolmogrov-Smirnov*. Normalitas data terpenuhi apabila nilai signifikansi $> \alpha$ (0,05) dan apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal (Ghozali, 2011:160).

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Untuk pengambilan keputusan dalam menentukan ada atau tidaknya multikolinieritas yaitu dengan kriteria sebagai berikut (1) Jika nilai VIF ≥ 10 atau nilai *tolerance* $\leq 0,10$ maka ada multikolinieritas dalam model regresi. (2) Jika nilai VIF ≤ 10 atau nilai *tolerance* $\geq 0,10$ maka tidak ada multikolinieritas dalam model regresi (Ghozali, 2011:105-106).

c. Uji Heteroskedastisitas

Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. (Ghozali, 2011:139).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen.

a. Uji Ketepatan Parameter Penduga (Uji t)

- 1) Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ atau $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima, ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi $t \leq 0,05$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak, ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F-test)

Jika nilai sig. $F < 0,05$ atau $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak yang artinya variabel independen secara serentak berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98).

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 terletak antara 0 dan 1, apabila R^2 semakin mendekati angka 1 maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Klaten. Sehingga teknik sampel yang digunakan adalah *Total Sampling*.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Laki-laki	42	87.5%
Perempuan	6	12.5%
Jumlah	48	100 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 42 orang dengan prosentase 87,5% dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 6 orang dengan prosentase 12.5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Tabel 2 Status Perkawinan Responden

Usia	Jumlah	Prosentase
Belum Menikah	3	6.2%
Menikah	45	93.8%
Jumlah	48	100 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang belum menikah sebanyak 3 orang atau sebesar 6.2%; dan yang sudah menikah sebanyak 45 orang atau sebesar 93.8%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden telah menikah.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 3 Usia Responden

Usia	Jumlah	Prosentase
23 - 36 tahun	13	27.1%
37 - 49 tahun	25	52.1%
50 - 63 tahun	10	20.8%
Jumlah	48	100 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang berusia 23 - 36 tahun sebanyak 13 orang atau sebesar 27,1%; responden yang berusia 37-49 tahun sebanyak 25 orang atau sebesar 52,1%; dan responden yang berusia 50 - 63 tahun sebanyak 10 orang atau sebesar 20.8%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 37 - 49 tahun.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4 Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Prosentase
SMA	11	22.9%
S1	37	77.1%
Jumlah	48	100 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang berpendidikan SMA sebanyak 11 orang atau sebesar 22.9%; responden yang berpendidikan S1 sebanyak 37 orang atau sebesar 77.1%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berpendidikan terakhir S1.

5. Karakteristik Responden Menurut Pengalaman Politik

Tabel 5 Pengalaman Politik Responden

Pengalaman Politik	Jumlah	Prosentase
2 - 5 tahun	24	50.0%
> 5 tahun	24	50.0%
Jumlah	48	100 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang telah mempunyai pengalaman dalam politik selama 2-6 tahun maupun yang lebih dari 5 tahun sama banyak, dimana masing-masing sebanyak 24 orang atau sebesar 50%.

6. Karakteristik Responden Menurut Pengalaman Menjadi Anggota Dewan

Tabel 6 Pengalaman Menjadi Anggota Dewan

Pengalaman Menjadi Anggota Dewan	Jumlah	Prosentase
Periode 1	23	47.9%
Periode 2	22	45.8%
Periode 3	3	6.2%
Jumlah	48	100 %

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang telah mempunyai pengalaman menjadi anggota dewan selama 1 periode sebanyak 23 orang atau sebesar 47,9%; sedangkan responden yang telah mempunyai pengalaman menjadi anggota dewan selama 2 periode sebanyak 22 orang atau sebesar 45,8%; dan responden yang telah mempunyai pengalaman menjadi anggota dewan selama 3 periode sebanyak 3 orang atau sebesar 6,2%.

Hasil Analisis Statistif Deskriptif

Tabel 7 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	n	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
PDTA	48	40.00	78.00	62.2708	7.96465
KO	48	10.00	24.00	16.9792	3.82872
AK	48	15.00	28.00	20.2917	3.35780
TKP	48	8.00	22.00	14.3125	2.40705
PDPKD	48	31.00	48.00	39.3542	4.22500

Sumber: data primer diolah, 2015

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa dari 16 pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban, sehingga diperoleh skor tertinggi 78 dan skor terendah 40, dengan skor rata-rata sebesar 62,271 dan standar deviasi 7,965. Berdasarkan analisis

deskriptif tersebut diketahui mayoritas pengetahuan anggota dewan tentang anggaran termasuk sedang.

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa dari 16 pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban, sehingga diperoleh skor tertinggi 24 dan skor terendah 10, diperoleh skor rata-rata sebesar 16,979 dan standar deviasi 3,829. Berdasarkan analisis deskriptif tersebut diketahui mayoritas komitmen organisasi anggota dewan termasuk sedang.

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa dari 16 pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban,, sehingga diperoleh skor tertinggi 28 dan skor terendah 15, diperoleh skor rata-rata sebesar 20,292 dan standar deviasi 3,358. Berdasarkan analisis deskriptif tersebut diketahui mayoritas akuntabilitas anggota dewan termasuk sedang.

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa dari 16 pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban,sehingga diperoleh skor tertinggi 22 dan skor terendah 8, diperoleh skor rata-rata sebesar 14,313 dan standar deviasi 2,407. Berdasarkan analisis deskriptif tersebut diketahui mayoritas transparansi kebijakan publik anggota dewan termasuk sedang.

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa dari 16 pertanyaan dengan 5 alternatif jawaban,sehingga diperoleh skor tertinggi 48 dan skor terendah 31, diperoleh skor rata-rata dukungan atasan39,354 dan standar deviasi 4,225. Berdasarkan analisis deskriptif tersebut diketahui mayoritas pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) anggota dewan termasuk sedang.

a. Uji Normalitas

Tabel 8 Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Sminov	<i>p value</i>	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0,573	0,905	Data terdistribusi normal

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Hasil perhitungan *Kolmogorov-Sminov* menunjukkan bahwa nilai signifikansinya (*p value*) sebesar $0,905 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi

asumsi normalitas atau dapat dikatakan sebaran data penelitian terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 9 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
PDTA	0.281	3.556	Tidak terjadi multikolinieritas
Komitmen Organisasi	0.344	2.908	Tidak terjadi multikolinieritas
Akuntabilitas	0.691	1.446	Tidak terjadi multikolinieritas
Transparansi Kebijakan Publik	0.429	2.330	Tidak terjadi multikolinieritas
PDTA_KO	0.180	5.548	Tidak terjadi multikolinieritas
PDTA_AK	0.321	3.111	Tidak terjadi multikolinieritas
PDTA_TKP	0.206	4.866	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1. Hal ini berarti menunjukkan bahwa tidak adanya masalah multikolinier dalam model regresi, sehingga memenuhi syarat analisis regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t Hitung	Sig	Keterangan
PDTA	-0.267	0.791	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Komitmen Organisasi	1.498	0.141	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Akuntabilitas	-0.791	0.433	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Transparansi Kebijakan Publik	-0.914	0.366	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PDTA_KO	0.830	0.411	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PDTA_AK	-1.033	0.307	Tidak terjadi heteroskedastisitas
PDTA_TKP	-0.527	0.601	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Berdasarkan hasil analisis seperti pada Tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai signifikansinya (p value) $>0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tidak mengandung adanya heteroskedastisitas, sehingga memenuhi persyaratan dalam analisis regresi.

Uji Analisis Regresi Berganda

Tabel 11 Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	<i>Unstandardize d Coefficients</i>	t	Sig	Keterangan
	B			
(Constant)	33.465	16.887	.000	
PDTA	.193	4.015	.000	H ₁ diterima
KO	.738	7.484	.000	H ₂ diterima
AK	.020	.257	.798	H ₄ ditolak
TKP	.384	2.739	.009	H ₆ diterima
PDTA_KO	.012	8.442	.000	H ₃ diterima
PDTA_AK	-.000	-.271	.788	H ₅ ditolak
PDTA_TKP	.006	3.003	.004	H ₇ diterima
R ²	= 0,901	F hit	= 97,710	
Adjusted R ²	= 0,892	F tab	= 2,59	
t table	= 2,017			

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Hasil analisis regresi linier berganda memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,015 > 2,017) diterima pada taraf signifikansi 5% ($p < 0,05$) dan H₁ diterima. Artinya pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hasil analisis regresi linier berganda memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (7,848 > 2,017) diterima pada taraf signifikansi 5% ($p < 0,05$) dan H₂ diterima. Artinya komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hasil analisis regresi linier berganda memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (8,442 > 2,017) diterima pada taraf signifikansi 5% ($p < 0,05$) dan H₃ diterima. Artinya komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan

dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hasil analisis regresi linier berganda memperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.257 < 2,017$) ditolak pada taraf signifikansi 5% ($p > 0,05$) dan H_4 ditolak. Artinya akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hasil analisis regresi linier berganda memperoleh nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0.271 < -2,017$) ditolak pada taraf signifikansi 5% ($p > 0,05$) dan H_5 ditolak. Artinya akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hasil analisis regresi linier berganda memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,739 > 2,017$) ditolak pada taraf signifikansi 5% ($p < 0,05$) dan H_6 diterima. Artinya transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hasil analisis regresi linier berganda memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,003 > 2,017$) ditolak pada taraf signifikansi 5% ($p < 0,05$) dan H_7 diterima. Artinya transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F-test)

Hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar $97,710 > F$ tabel ($2,59$) dengan nilai signifikannya sebesar $0,000$ pada tingkat signifikan $0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar $0,892$ yang berarti variabilitas variabel dependen dapat

dijelaskan oleh variabel independen sebesar 89,2%. Hal ini berarti variabel-variabel independen meliputi pengetahuan dewan tentang anggaran, komitmen organisasi, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik beserta interaksinya mempengaruhi pengawasan dewan pada keuangan daerah sebesar 89,2% sedangkan sisanya sebesar 10,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t, yang mana menunjukkan nilai t hitung $>$ t table ($4,015 > 2,017$) dengan *p-value* $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu H1 diterima.
2. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t, yang mana diperoleh nilai t hitung $>$ t table ($7,484 > 2,017$) dengan *p-value* $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu H2 diterima.
3. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t, yang mana diperoleh nilai t hitung $<$ t table ($8,442 < 2,017$) dengan *p-value* $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu H3 diterima.
4. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t, yang mana diperoleh nilai t hitung $<$ t table ($0,257 < 2,017$) dengan *p-value* $0,798 > 0,05$. Oleh karena itu H4 ditolak.
5. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hal ini

ditunjukkan dari hasil uji t, yang mana diperoleh nilai t hitung $< t_{table}$ $(-0.271 < -2,017)$ dengan $p-value$ $0,788 > 0,05$. Oleh karena itu H5 ditolak.

6. Tranparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t, yang mana diperoleh nilai t hitung $> t_{table}$ $(2,739 > 2,017)$ dengan $p-value$ $0,009 < 0,05$. Oleh karena itu H6 diterima.
7. Tranparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t, yang mana diperoleh nilai t hitung $> t_{table}$ $(3,003 > 2,017)$ dengan $p-value$ $0,004 < 0,05$. Oleh karena itu H7 diterima.

SARAN

1. Penelitian selanjutnya agar menggunakan metode wawancara secara langsung kepada responden agar responden memberikan jawaban dengan kesungguhan dan keseriusan, serta peneliti lebih terlibat dalam proses penelitian tersebut.
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel yang diteliti yaitu tidak hanya pengetahuan, komitmen organisasi, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik dalam mempengaruhi pengawasan keuangan daerah dan sebagai variabel moderating yaitu komitmen organisasi, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik.
3. Peneliti selanjutnya disarankan perlu memperluas wilayah sampel penelitian diperluas menjadi seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah agar aspek pengawasan keuangan daerah dapat lebih jelas terlihat.

DAFTAR PUSTAKA

- Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, Lilik. 2010. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)*. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Purwokerto.
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke lima belas. Bandung: Alfabeta.
- Novietta, Liza. 2010. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi terhadap hubungan Pengetahuan Eksekutif tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan & Bisnis*. Volum 2 no
- Utami, Kurnia dan Syofyan, Efrizal. 2013, *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*, Jurnal WRA, Vol. 1, No. 1 April, Padang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Kelima. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Masri, Sulaiman. 2007. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.